

“ALLOTMENT” - MODEL PERTANIAN PERKOTAAN (*URBAN FARMING*) DI INGGRIS (PARADIGMA PENDEKATAN PEMBANGUNAN)

Mochammad A Junaidi¹

¹⁾ Staff Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Indonesia; PhD student, University of Southampton, UK

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada tahun 1926 di Luxemburg, kongres internasional pertama tentang isu perlunya kebun rekreasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah perkotaan dilakukan. Moment ini juga menjadi tonggak sejarah lahirnya *Allotment* sebagai suatu konsep pertanian perkotaan (*Urban Farming*) di berbagai negara-negara Eropa, termasuk negara Inggris. Senada dengan hal ini, pemerintah Inggris melalui Departemen Masyarakat dan Pemerintah Lokal telah membuat kebijakan bahwa ‘masyarakat menginginkan fasilitas publik yang baik untuk membantu mereka berkembang dengan cara-cara yang benar (DCLG, 2013). Sejak itulah, organisasi *Allotment* (*The National Allotment Society*) mulai didirikan untuk menghadapi berbagai macam isu terkait dengan persoalan lingkungan serta mempromosikan keterlibatan sosial masyarakat.

Dalam tataran praktis, kebijakan sosial tersebut ditindaklanjuti pengalokasian jatah lahan (dikenal dengan istilah *Allotment*) yang diperuntukkan untuk berkebun atau bertani secara komunal oleh masyarakat perkotaan (NAS, 2015b). Konsep inilah yang menjadi dasar tata guna lahan *Allotment* untuk budidaya pertanian oleh masyarakat perkotaan yang mengacu pada ketentuan yang diatur oleh hukum dan administrasi yang menjamin pada kepatuhan hukum penjatahan *Allotment*. Salah satu ketentuan hukum *Allotment*, misalnya perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemetintah kota dengan pengguna *Allotment* (bukan hak milik, tetapi hanya hak kelola lahan) (NAS, 2013). Lebih lanjut, adanya sistem penjatahan (daftar tunggu) pengalokasian *Allotment* kepada masyarakat yang menginginkan lahan untuk

bertani atau berkebun di perkotaan sebagai upaya untuk mengatur tata kelola *Allotment* menjadi lebih terorganisir. Adapun dampak penjatahan lahan *Allotment* oleh masyarakat diharapkan menjadi stimulus sistem manajemen budidaya pertanian perkotaan secara kolektif yang saling melengkapi diantara pengguna *Allotment*. Dari aspek sosial, keberadaan *Allotment* diharapkan dapat menjadi wahana interaksi sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin berbagi apresiasi pertanian perkotaan (*Urban Farming*).

Pergeseran Paradigm dalam Pendekatan Pembangunan

Istilah 'pembangunan' telah bergeser dalam arti pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda dan di antara orang yang berbeda. Awalnya, gagasan pembangunan didefinisikan sebagai kemajuan terus menerus dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah sumber daya yang tersedia dan tingkat produktivitas, yang merupakan pertumbuhan ekonomi (Willis, 2005; Suri et al., 2011; Burghelea, 2012). Pandangan dari konsep-konsep pembangunan sebagai aspek pertumbuhan ekonomi dapat

ditelusuri dari perdebatan tentang pertumbuhan dari perspektif ekonomi klasik yang muncul pada abad kedelapan belas. Ini dimulai dengan konsep pertumbuhan yang akan terjadi ketika sistem ekonomi mampu mencapai pembagian kerja yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Hechter & Horne, 2003; Smith, 2013). Selain itu, pengaruh pemikiran Keynes 'juga menekankan pentingnya permintaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi investasi dan produktivitas modal (Blinder, 2008; Robinson, 2013). Sementara, Kingsbury et al. (2004) berpendapat bahwa karena meningkatnya penggunaan teknologi di semua sektor ekonomi, pembangunan disamakan dengan industrialisasi, modernisasi dan westernisasi. Dalam hal ini, pengembangan memiliki multitafsir yang mengandung unsur perubahan, terutama dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, konsep pembangunan telah didominasi oleh ekonomi arus utama tahun 1950- tahun 1960-an.

Selain itu, ada dorongan yang berkembang untuk mencari alternatif untuk paradigma pembangunan yang tidak hanya menyoroti pertumbuhan ekonomi, tapi mengarah ke pembangunan sosial. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menilai efek dari pembangunan kesejahteraan adalah distribusi dan pertumbuhan ekonomi (Tanzi & Chu, 1998). Konsep ini cenderung mempertimbangkan ukuran distribusi pendapatan, yang biasanya mengukur seberapa adil sumber daya didistribusikan dalam suatu populasi. Gini Index, misalnya, mengukur distribusi pendapatan dan fungsi kesejahteraan sosial masyarakat di suatu negara (FAO, 2006). Selain distribusi pendapatan, dampak dan hasil pembangunan di suatu negara juga dapat diukur dengan melihat tingkat kemiskinan (Chambers, 1995; Coudouel et al., 2002; May, 2012). Meskipun pembangunan harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan pembangunan tetap penting karena dimensi sosial dalam melaksanakan program-program pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan dalam studi pembangunan.

Salah satu diskusi saat ini yang paling signifikan dalam bidang studi pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang bisa dilakukan dengan membangun kemampuan manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian mereka (Sen, 1990, 1993). Chambers (1997, 2004) dan Rakodi (2012a) juga berpendapat bahwa pembangunan mengacu pada proses dan perubahan dalam berbagai aspek masyarakat manusia yang tidak hanya terfokus pada membaiknya memperoleh atau kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan dengan meningkatkan kondisi manusia. Dalam konteks ini, proses pembangunan menunjukkan usaha sadar dan perencanaan selama tahap kegiatan pembangunan. Sementara, perubahan menunjukkan dampak dari pembangunan yang menunjukkan perbedaan hasil dari kondisi sebelumnya. Dalam konsep ini, pembangunan pada dasarnya adalah proses yang dinamis yang terus-menerus dalam mencapai harapan bahwa hidup bisa lebih sejahtera. Dengan demikian, pembangunan benar-benar mencerminkan proses perubahan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di semua sektor kehidupan (Rapley, 2007; Peet & Hartwick, 2009).

Pandangan bahwa pembangunan sekarang telah bergeser ke pembangunan yang berpusat pada rakyat menempatkan orang sebagai pusat pembangunan. Konsep ini

diperkenalkan secara luas oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 1990-an, dimana pencapaian pembangunan diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator, seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan (UNDP, 2013). Orientasi pembangunan juga dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Anand & Sen 2000; Robert et al., 2005; Rauschmayer et al., 2011). Dalam hal ini, pembangunan harus menargetkan orang sebagai dasar, dari mana kebutuhan masyarakat dibahas dan bertemu di masa sekarang, tanpa mengorbankan peran generasi mendatang baik sebagai subjek dan objek pembangunan.

METODOLOGI

Memahami konsep Allotment sebagai model pertanian perkotaan (*urban farming*) di Inggris melalui beberapa dokumen adalah penting dalam penulisan paper ini. Sebagai sumber informasi yang berfokus pada fakta dan konten untuk merekam realitas sosial, dokumen mewakili unsur efek kausal, seperti keaslian, kredibilitas, representasi dan makna (Scott, 2006; Bryman, 2012). Selain itu, Bowen (2009; p.28) menyatakan bahwa "*Document analysis is a systematic procedure for reviewing or evaluating documents - both printed and electronic (computer-based and Internet transmitted) material and like other analytical methods in qualitative research, document analysis requires that data be examined and interpreted in order to elicit meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge*". (Analisis dokumen adalah prosedur yang sistematis untuk mengkaji atau mengevaluasi dokumen (baik dokumen cetak dan elektronik berbasis komputer) dan seperti metode analisis lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen membutuhkan data yang diperiksa dan diinterpretasikan dalam rangka untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris). Melihat pentingnya dokumen, saya mulai mengidentifikasi berbagai dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan topik kajian dalam paper ini, misalnya dokumen yang dipublikasikan oleh *the National Allotment Society* tentang dokumen panduan manajemen Allotment (NAS, 2015b), dokumen tat acara sewa Allotment (NAS, 2013), dokumen terkait dengan social interaksi dalam Allotment (NAS, 2015d), serta dokumen penunjang lainnya. Sebagian besar dokumen-dokumen ini terkait dengan kebijakan pemerintah serta peraturan tentang program Allotment dalam kaitannya dengan program pertanian perkotaan.

Apa itu Allotment?

Istilah Allotment sudah ada sejak puluhan abad lalu dengan bukti merujuk periode masa Anglo-Saxon. Gerakan Allotment nasional yang pertama mulai digulirkan di Inggris pada awal abad 19, menempatkan kewajiban pemerintah daerah memberikan jatah lahan yang cukup untuk usaha pertanian perkotaan secara komunal. Namun, Allotment yang kita kenal sekarang (mengacu pada kongres internasional tentang Allotment), ketika tanah atau lahan yang telah diserahkan kepada orang miskin yang bekerja untuk pertanian yang diharapkan mampu menyediakan cadangan makanan. Menurut organisasi nasional Allotment (NAS, 2015b), langkah ini didukung oleh undang-undang kebijakan sosial serta sangat dibutuhkan sebagai akibat pertumbuhan industrialisasi yang pesat dari negara serta kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kamus Oxford³, Allotment adalah sebuah lahan yang disewa oleh seorang individu untuk menanam sayuran atau bunga. Dalam konteks ini, seseorang dapat memiliki hak sewa dan hak guna Allotment jika mereka melakukan proses sewa (rent) serta perjanjian lain (agreement) terkait dengan manajemen pengelolaan Allotment (NAS, 2013). Sebagai lahan jatah yang disewa dari tuan tanah (landlords – dalam hal ini pemerintah atau organisasi Allotment), pemegang penjatahan (Allotment holders) diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Adapun biaya sewa ini akan digunakan untuk menutupi tagihan air (irigasi) serta tagihan perawatan umum. Besarnya biaya sewa pemegang plot Allotment bervariasi, yaitu dalam kisaran £25 - £100 (atau sekitar 500 ribu – 1 juta rupiah) per tahun. Meskipun undang-undang hukum ada yang berkaitan dengan pembagian jatah lahan Allotment, faktor lokasi Allotment menentukan besarnya biaya sewa (dengan jumlah yang wajar) yang harus dibayarkan oleh pemegang penjatahan.

Selanjutnya, pemegang penjatahan juga diwajibkan bergabung bersama asosiasi Allotment (asosiasi masyarakat penjatahan di tingkat lokal) serta diwajibkan untuk menandatangani perjanjian sewa-menyewa yang menguraikan apa yang diharapkan dari mereka (NAS, 2015c). Perjanjian ini mencakup mekanisme sewa Allotment, jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam Allotment, manajemen bangunan Gudang Allotment, serta perilaku umum pemegang petak Allotment. Adapun secara detail, perjanjian sewa (NAS, 2013) Allotment meliputi kesinambungan keuangan jangka panjang Allotment berdasarkan penilaian yang realistis dari pengeluaran masa depan; ketersediaan sumber daya lainnya dari sewa yang dapat membantu memenuhi biaya penyediaan dan pengelolaan kebun penjatahan dan infrastruktur Allotment; tingkat hadir pemilik dan tradisi bersejarah Allotment; serta biaya untuk pengguna kegiatan rekreasi atau olahraga outdoor lainnya yang disediakan oleh otoritas local untuk pemegang hak kelola Allotment. Hal terpenting dalam perjanjian ini adalah adanya kesepakatan hari berkebun bersama yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari Minggu (mengacu pada Tenancy Agreement⁴). Secara praktis, berbagai tanaman komoditas pertanian, seperti sayur dan buah dapat dibudidayakan dalam Allotment (foto penggunaan Allotment untuk usaha pertanian di Inggris disajikan dalam lampiran 1).

Interaksi sosial dalam Allotment (Allotment Society)

Masyarakat percaya bahwa keberadaan Allotment telah dipikirkan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan skema manajemen yang diatur undang-undang, termasuk didalamnya mekanisme serah terima allotment dari pemerintah daerah kepada pemilik hak kelola Allotment melalui organisasi masyarakat Allotment (Allotment society⁵). Oleh Karena itu, masyarakat wajib melaksanakan skema manajemen Allotment sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam The National Allotment Society (NAS, 2015a). Lebih lanjut, berdasarkan kesepakatan National Allotment Society, masyarakat wajib mengetahui hak dan kewajiban setiap pengguna Allotment sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa serta meminimalisir pelanggaran yang terkait dengan pemanfaatan Allotment. Misalnya, ketika pemilik hak kelola Allotment mengundang seseorang untuk datang ke lokasi Allotment, mereka harus bertanggungjawab atas segala perilaku setiap orang (seperti: tidak merusak tanaman serta turut menjaga kebersihan lingkungan).

³ Allotment means a plot of land rented by an individual for growing vegetables or flowers'
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/allotment>

Dengan adanya penerapan konsep manajemen Allotment yang baik, masyarakat mengakui bahwa di lokasi Allotment bisa menjadi tempat bersosialisasi, dihuni oleh orang-orang yang saling berbagi dan saling menghargai dalam melakukan aktifitas pertanian perkotaan (NAS, 2015d). Tidak hanya sekedar urusan teknis pertanian, masyarakat juga mendorong kegiatan yang lebih baik untuk pengembangan interaksi sosial dan rasa kebersamaan di dalam Allotment. Dengan Konsep seperti ini, keberadaan Allotment diharapkan menjadi alternatif wahana sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat, baik antara pemilik hak kelola Allotment maupun pihak lain yang peduli dengan keberadaan Allotment.

KESIMPULAN

Keberadaan Allotment di Inggris telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki hak kelola lahan (mengacu pada sistem perjanjian sewa menyewa lahan Allotment (NAS, 2013)) yang dapat dioptimalkan untuk kegiatan pertanian perkotaan. Dalam konteks ini, selain fokus pada teknis budidaya pertanian, keberadaan Allotment telah menjadi stimulus gerakan nasional pertanian perkotaan yang menjadi wahana menciptakan sosial interaksi masyarakat di Negara Inggris, misalnya keberadaan asosiasi Allotment (*The National Allotment Society*).

⁴ A Tenancy Agreement dating back to 1846 serving the Parish of Husbands Bosworth states "Every occupier is expected to attend divine service on Sundays; and any occupier who digs potatoes or otherwise works on his land on Sunday shall immediately forfeit the same"
<http://www.nsalg.org.uk/allotment-info/brief-history-of-allotments/>

⁵ <http://www.nsalg.org.uk/>

REFERENSI

- Anand, S., & Sen, A. (2000). Human Development and Economic Sustainability. *World Development*, 28(12), 2029–2049. [http://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00071-1](http://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00071-1)
- Blinder, A. S. (2008). *Keynesian Economics*. The concise encyclopedia of economics. Retrieved from <http://www.econlib.org/LIBRARY/Enc/KeynesianEconomics.html>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods (4th Edition)* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <http://global.oup.com/?cc=g>
- Burghilea, C. (2012). The Sustainable Development Model. *Theoretical and Applied Economics*, 19(5), 125–136. Retrieved from <http://store.ectap.ro/articole/725.pdf>
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <http://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Chambers, R. (1997). Editorial: Responsible Well-Being - A Personal Agenda for Development. *World Development*, 25(11), 1743–1754. [http://doi.org/PII:S0305-750X\(97\)10001-8](http://doi.org/PII:S0305-750X(97)10001-8)
- Chambers, R. (2004). *Ideas for Development: Reflecting Forwards*. Brighton. Retrieved from <http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/669/Wp238.pdf>
- Coudouel, A., Hentschel, J. S., & Wodon, Q. T. (2002). Poverty Measurement and Analysis. In *A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies*. (pp. 27–74). Washington, DC: World Bank. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/3836061205334112622/5467_chap1.pdf
- DCLG. (2013). *You've Got the Power: A Quick and Simple Guide to Community Rights*. FAO. (2006). *Inequality analysis: The Gini Index* (FAO December 2006). Urbino, Italy. Retrieved from http://www.fao.org/docs/up/easypol/329/gini_index_040en.pdf
- Hechter, M., & Horne, C. (2003). The division of labour. In *Theories of social order* (pp. 251–260). California: Stanford University Press. Retrieved from <https://books.google.co.uk/books?id=KiGYZ6Mb1IYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Kingsbury, D., Remenyi, J., McKay, J., & Hunt, J. (2004). *Key Issues in Development*. (D. Kingsbury, J. Remenyi, J. McKay, & J. Hunt, Eds.) (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. Retrieved from https://www.academia.edu/2004699/Key_Issues_in_Development